ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA KANDIS)

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND MANAGEMENT (CASE STUDY ON KANDIS VILLAGE)

SKRIPSI

Oleh :

INDAH HERAWATI SITINJAK
2162201033

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LANCANG KUNING

PEKANBARU

2025

ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA KANDIS)

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND MANAGEMENT (CASE STUDY ON KANDIS VILLAGE)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Sarjana Lengkap Pada Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Lancang Kuning

Oleh :

INDAH HERAWATI SITINJAK
2162201033

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LANCANG KUNING

PEKANBARU

2025

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : **INDAH HERAWATI SITINJAK**

NIM : **2162201033**

FAKULTAS : **EKONOMI DAN BISNIS**

JURUSAN : **AKUNTANSI**

JUDUL : **ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA KANDIS)**

DISETUJUI

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. Neneng Salmiah, S.E., M.M., AK., CA	**Rizqa Anita, S.E.,M.M.,M.AK.,Ak., Ph.D**
NIDN : 1012096801	**NIDN:1023088901**

DEKAN	KETUA JURUSAN
Dr. Dini Oktasis, SE., SH.,MM.,MH.,AK.,CA.ACPA	**Dr. Neneng Salmiah, S.E., M.M., AK., CA**
NIDN : 1006067101	**NIDN : 1012096801**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : **INDAH HERAWATI SITINJAK**

NIM : **2162201033**

FAKULTAS : **EKONOMI DAN BISNIS**

JURUSAN : **AKUNTANSI**

JUDUL : **ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KSUS PADA DESA KANDIS)**

KETUA

Dr. Neneng Salmiah, S.E., M.M., AK., CA
NIDN : 1012096801

SEKRETARIS

Serly Novianti, S.E.,M.Ak
NIDN:1007118903

ANGGOTA

Faizah Kamilah, SE,M.Ak,Ak
NIDN : 1012088901

Satria Tri Nanda, SE,M,Si.,PH.D
NIDN:1019029001

Dr. Neneng Salmiah, S.E., M.M., AK., CA
NIDN : 1012096801

Rizqa Anita, S.E.,M.M.,M.AK.,Ak., Ph.D
NIDN:1023088901

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA KANDIS)

Indah Herawati Sitinjak

Untuk melaksanakan dan menunjang pembangunan desa salah satu bentuk bantuan langsung dari pemerintah pusat adalah dana desa. Dana desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa di Desa Kandis. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif. Dimana data yang diperoleh dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan sesuai kenyataan realita yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan dana desa belum sepenuhnya optimal. Dalam aspek Akuntabilitas masih ditemukan keterlambatan dalam pembuatan laporan keuangan desa. Sedangkan dalam aspek transparansi, informasi mengenai penggunaan dana desa belum sepenuhnya disampaikan kepada masyarakat, seperti papan pengumuman kegiatan yang tidak mencantumkan waktu pelaksanaan, volume kegiatan, dan ilustrasi kegiatan. Selain itu, belum tersedia saluran pengaduan masyarakat. Temuan ini perlu peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Dana Desa

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND MANAGEMENT (CASE STUDY ON KANDIS VILLAGE)

Indah Herawati Sitinjak

To carry out and support village development, one of the forms of direct assistance from the central government is village funds. Village funds are direct financial assistance allocated to the village government that are used to improve community service facilities. The purpose of the research is to analyze the implementation the management of Village Funds in Kandis Village. Data collection was conducted through interviews, observations, and documentation. The informants in this research were the Village Head, Village Secretary, and the Head of Finance. The results of the study show that the implementation of management of Village Funds in Kandis Village has not been fully optimal. In terms of accountability, there are still delays in the preparation of village financial reports. In terms of transparency, information delivery to the public is still lacking, such as activity boards that do not include the implementation time, activity volume, or visual illustrations. In addition, there is no complaint channel available for the community. These findings indicate the need to improve accountability and transparency in the management of Village Funds.

Keywords: Accountability, Transparency, Village Funds

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis dalam bentuk skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan atau Doktor) baik di Universitas Lancang Kuning maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dalam daftar Pustaka.
4. Penyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karya tulis ini, serta lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 01 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Indah Herawati Sitinjak

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaanNya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Kandis)".

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Studi Strata-1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lancang Kuning. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini mendapat banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Dini Onasis, S.E., S.H., M.M., M.H., AK., CA., ACPA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning. Bapak Zaharman, SE., M.Si., AK., CA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning. Bapak Aljufri, S.E., M.Ak., AK., CA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning. Bapak Dr. Fatkhurahman, S.E., M.Si., M.M. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning.
2. Ibu Dr. Neneng Salmiah, S.E., M.M., Ak., CA selaku Kaprodi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning sekaligus sebagai selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, pengarahan, waktu, dan tempat sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik..

3. Ibu Serly Novianti, S.E., M.Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Rizqa Anita, S.E., M.M., M.Ak., Ak., Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, pengarahan, waktu, dan tempat sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah mendidik dan mengajarkan banyak ilmu yang dapat membuka wawasan peneliti selama masa perkuliahan. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu peneliti dalam pelayanan administrasi yang dibutuhkan selama perkuliahan.
6. Orang tua tercinta Ayah Hermanto Sitinjak dan Ibu Nurhaida Nainggolan. yang telah menjadi sumber kekuatan, semangat, dan doa dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis, khususnya selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kasih sayang yang tak pernah habis, doa-doa yang tak pernah putus, serta segala pengorbanan dan kesabaran Ibu dalam mendampingi penulis hingga berada di titik ini. Cinta dan perjuangan Ibu adalah cahaya yang menerangi jalan penulis di saat sulit, dan menjadi alasan utama penulis untuk terus maju dan tidak menyerah. Semoga segala kebaikan dan ketulusan Ibu dibalas berlipat ganda oleh Tuhan Yang Maha Esa. Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh cinta dan hormat untuk Ibu, sebagai wujud kecil dari rasa terima kasih yang tak terhingga.
7. Skripsi ini penulis persembahkan untuk abangku Raja Tua Sitinjak, yang

selalu memberikan support dan dukungan tanpa henti selama perjalanan pendidikan penulis. Meskipun dulu penulis tidak pernah benar-benar merasakan bagaimana rasanya punya abang, abang telah memberiku kesempatan untuk merasakan sosok seorang abang yang selalu ada. Penulis sangat berterima kasih atas segala jasa dan bantuan abang selama masa pendidikan. Jasa-jasa abang terlalu banyak untuk disebut satu per satu, tapi semuanya sangat berarti bagi penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakakku, Romasi Sinaga, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan hingga skripsi ini dapat selesai

8. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Joni Fernando Siburian atas kehadirannya yang selalu menemani dan mendengarkan setiap keluh kesah selama proses pendidikan ini. Dukungan dan perhatian yang diberikan sangat berarti dan menjadi sumber semangat bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada teman-teman satu kost di Kost Pelangi yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam perjalanan pendidikan penulis. Meskipun penulis tidak dapat menyebutkan nama satu per satu, kebersamaan, dukungan, dan keceriaan yang kalian berikan sangat berarti dan membantu penulis melewati masa-masa sulit hingga skripsi ini selesai.
10. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

Pemerintah Kantor Desa Kandis beserta seluruh stafnya atas segala bentuk bantuan, kerja sama, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penelitian ini berlangsung. Terima kasih atas waktu, informasi, serta fasilitas yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Ucapan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebaikan kalian semua. Semoga segala kebaikan kalian mendapat balasan yang lebih baik lagi dari Tuhan Yang Maha Esa. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Besar harapan peneliti bahwa adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi peneliti dan peneliti selanjutnya.

Pekanbaru, 01 Juli 2025
Yang Membuat Pernyataan,

Indah Herawati Sitinjak

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
PERNYATAAN ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 12
1.3.1 Tujuan Penelitian 12
1.3.2 Manfaat Penelitian 12
1.4 Sistematika Penulisan 13
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN **15**
2.1 Telaah Pustaka 15
2.1.1 *Agency Theory* 15
2.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa 17
2.1.3 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 21
2.1.4 Akuntabilitas 22
2.1.5 Transparansi 26
2.1.6 Desa 30
2.1.7 Penelitian Terdahulu 35
2.2 Kerangka Pemikiran 43
BAB III METODE PENELITIAN **46**
3.1 Objek Penelitian 46
3.2 Jenis Dan Sumber Data 46
3.2.1 Jenis Data 46
3.2.2 Sumber Data 46
3.3 Teknik Pengumpulan Data 47

3.4 Identifikasi Dan Operasional Variabel 48
3.5 Analisis Data 48
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 50
4.1 Geografis Kantor Desa Kampung Kandis 50
4.2 Demografis 50
4.3 Visi dan Misi 51
4.4 Struktur Organisasi 51
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53
5.1 Hasil Penelitian 53
5.1.1 Pengelolaan Dana Desa Kandis 53
5.1.2 Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Kandis Kabupaten Siak 54
5.1.3 Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa 68
5.2 Pembahasan 77
5.2.1 Pengelolaan Dana Desa Kandis Kabupaten Siak 77
5.2.2 Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Kandis 80
5.2.3 Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Kandis 84
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 88
6.1 Kesimpulan 88
6.2 Saran 89
6.3 Implikasi 90
DAFTAR PUSTAKA 78
LAMPIRAN - LAMPIRAN 81

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

Tabel 1.1 APBDes Desa Kandis Tahun 2023 4

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 38

Tabel 3.1 Definisi dan Operasionalisasi Variabel 48

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 50

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 45
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Kandis 52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Perubahan pemerintah Indonesia secara desentralisasi dalam otonomi daerah mengakibatkan perubahan pada pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pola perubahan hubungan tersebut adalah perubahan wewenang dan tanggung jawab pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Konsep desentraliaasi dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah menunjuk tiga pola otonomi. Pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi desa merupakan otonomi yang asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

Demi tercapainya tujuan bersama, suatu pemerintahan dapat dikatakan terselenggara dengan baik jika tata kelola pemerintahan (*good government governance*) diterapkan dengan menganut prinsip akuntabilitas, transparan, partisipasi, tertib hukum, daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efesiensi dan efektifitas serta visi strategis. Desa sebagai unit organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat mengenai latar belakang kepentingan dan kebutuhannya memiliki peranan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dalam pelayanan publik.

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, beliau membuat peraturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan pengelolaan dan kebijakan keuangan dana desa yang diharapkan dapat membantu aparatur desa dalam mengimplementasikan dan menerapkan manfaat dari dana desa agar desa lebih berkontribusi dalam pembangunan dengan baik. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur keuangan dan aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Desa, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi.

Desa merupakan suatu tempat yang menjadi satu kesatuan dari perwakilan masyarakat yang mempunyai batas wilayah untuk mengatur serta mengurus segala bentuk urusan pemerintahan, kepentingan dan tujuan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 menetapkan bahwa dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membantu dalam mewujudkan desa yang maju dan mandiri. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa paradigma dan konsep baru tentang bagaimana kebijakan pemerintahan desa digunakan di seluruh tanah air. Kemudian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bahwa pemerintah desa akan diberikan dana untuk dikelola sebagai pembiayaan terhadap

penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan acuan tersebut maka pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi pradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, yang menjadi lebih baik dalam pengelolaannya (Anastasya and Noviyanti, 2023).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Hal tersebut berupa tanggungjawab pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yang berasal dari dana desa, namun pada realisasinya jika dilihat dari data yang diperoleh dengan hasil di lapangan masih adanya ketidaksesuaian dengan jumlah pembangunan yang direncanakan dengan bukti di lapangan (Anggini, 2020).

Saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa adalah APBDes yang tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran. Penyusunan APBDes dana adanya Alokasi Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong Good Governance. Good

Governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan dengan menjaga keseimbangan sinergitas kontruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Tidak mudah menerapkan prinsip prinsip Good Governance pada pemerintah tingkat pusat maupun pemerintah tingkat daerah bahkan pemerintah desa.

Penelitian ini memilih objek penelitian di Desa Kandis merupakan salah satu kampung yang terletak di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Desa Kandis merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Siak yang menerima dana APBDesa setiap tahunnya. Untuk melihat rincian APBDesa Kandis Tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.1 APBDes Desa Kandis Tahun 2023

Rincian APBDes	Tahun 2023			
	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
Rincian Pendapatan				
Pendapatan Transfer	**3.001.885.000**	**3.001.885.000**	-	100
Pendapatan Asli Desa	5,000,000	5,000,000	-	100
Dana Desa	1,490,550,000	1,490,550,000	-	100
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	104,942,000	104,942,000	-	100
Alokasi Dana Desa	1,183,993,000	1,183,993,000	-	100
Bantuan Keuangan Provinsi Riau	172,000,000	172,000,000	-	100
Bantuan Keuangan Kabupaten	50,400,000	50,400,000	-	100
Pendapatan Lain-Lain	2,095,208	2,095,208	-	100
Jumlah Pendapatan	**3,008,980,208**	**3,008,980,208**	-	100
Rincian Belanja				
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1,173,134,298	1,109,132,239	64,002,059	94.54

Rincian APBDes	Tahun 2023			%
	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
Bidang Pembangunan Desa	869,469,300	846,749,300	22,720,000	97,39
Bidang Pembinaan Masyarakat	209,848,800	203,724,300	6,124,500	97,08
Bidang Pemb. Masyarakat	455,058,048	450,057,000	5,001,048	98,90
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	262,800,000	262,800,000	-	100
Jumlah Belanja	**2,970,310,446**	**2,872,462,839**	**97,847,607**	96.71
Surplus / (Defisit)	**38. 669.762**	**136.517.369**	**97.847.607**	
Pembiayaan				
SILPA Tahun Sebelumnya	223.708.238	223.708.238	-	100
Pengeluaran Pembiayaan	262.378.000	257.378.000	(5.000.000,00)	98.09
Jumlah Pembiayaan	(38.669.762)	(33.669.762)	(5.000.000,00)	(15.05)
Silpa/Silpa Tahun Berjalan	**0,00**	**102.847.607**	**(102.847.607)**	39.20

Sumber : APBDesa Desa Kandis, 2023

Tabel 1.1 memperlihatkan Data APBDes 2023 di Siskeudes menunjukkan rincian yang sangat detail terkait sumber pendapatan dan alokasi belanja, Ini mencerminkan bahwa tugas dan tanggung jawab setiap bidang telah dirinci dengan baik. Realisasi anggaran mencapai 96,71% dari total belanja, yang berarti kegiatan yang direncanakan telah sebagian besar dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan secara efektif dan efisien. Pencatatan pendapatan dan belanja sangat rinci, informasi pelaporan disampaikan secara lengkap, dapat diverifikasi, dan terstruktur. Informasi disajikan secara terperinci. Tidak ada data yang disembunyikan, dan semua elemen anggaran diungkap secara

transparan. Akan tetapi data ini bersifat tidak untuk dipublikasikan dalam laporan resmi APBDes, tidak ada dipapan informasi desa, atau serta situs resmi pemerintah desa, sehingga masyarakat tidak memiliki akses langsung terhadapnya. Hal ini memperlihatkan bahwa indikator kemudahan mengakses informasi belum terlaksana. Artinya secara pembukuan, pengelolaan APBDes Tahun 2023 sudah disusun dengan baik dan lengkap, menunjukkan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis. Namun, dari sisi kemudahan mengakses informasi yang ditampilkan di papan pengumuman desa tidak sesuai dengan data dalam pembukuan tersebut. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi belum sepenuhnya terlaksana, karena masyarakat tidak memperoleh informasi yang benar dan utuh terkait penggunaan anggaran desa.

Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan Perangkat Desa Bagian Keuangan Desa ditemukan permasalahan yang muncul yaitu adanya indikasi bahwa di Desa Kandis kurangnya pertanggungjawaban dari pemerintah desa dalam mengelola dana desa, permasalahannya Desa Kandis mengalami keterlambatan dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi kepada Bupati. Hal ini terlihat dari laporan semester 1 yang seharusnya dilaporkan paling lambat pada minggu kedua bulan juli, akan tetapi baru dilaporkan pada tanggal 27 Agustus 2024, kemudian laporan semester 2 yang seharusnya akhir tahun baru dilaporkan pada tanggal 17 Januari 2024. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 68 menjelaskan bahwa Kepala Desa menyusun laporan pelaksanan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan dengan

cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Keterlambatan ini mengakibatkan pencairan dana desa untuk tahap kedua juga akan ikut terlambat, dan untuk tahun selanjutnya. hal ini tentunya akan menghambat penyelenggaraan pemerintahan desa. Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban itu disebabkan karena adanya ketidaktepatan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan desa.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan salah satu perangkat desa diketahui Kepala desa tidak melaporkan kegiatan yang diselenggarakan kepada masyarakat sehingga hal ini menunjukkan tidak adanya transparansi pada pengelolaan keuangan. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 72 menjelaskan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat 1) Nama dan alamat, 2) Tahun Anggaran, 3) Jenis Kegiatan, 4) Volume kegiatan, 5) jumlah anggaran, 6) waktu pelaksanaan, 7) pelaksana kegiatan, 8) foto atau gambar ilustrasi. Akan tetapi berdasarkan observasi dilapangan ditemukan bahwa pada papan informasi tidak mencantumkan volume kegiatan, waktu pelaksanaan, serta foto atau gambar ilustrasi. Selain itu tidak adanya alamat pengaduan yang dibuat untuk informasi, sehingga masyarakat tidak semuanya mengetahui berapa dana desa yang dikeluarkan dan masyarakat tidak dapat melihat pelaksaaan dalam satu semester karena kegiatan yang dilakukan dilaporkan di siskeudes dan masyarakat tidak dapat mengaksesnya. Tentu hal ini apabila dilihat dari prinsip transparansi menunjukkan belum sepenuhnya terlaksana, ini terlihat dari informasi mengenai

kegiatan pengelolaan keuangan desa tidak mencantumkan kegiatan yang belum terlaksana dan kegiatan yang tidak terlaksana selain itu pada papan informasi mengenai anggaran dana desa hanya dilaporkan anggaran saja sementara untuk dana yang kegiatannya belum terlaksana namun sudah direncanakan tidak secara menyeluruh ditampilkan di papan informasi sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa kegiatan yang belum terlaksana. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kandis belum sepenuhnya dilakukan secara optimal dibuktikan pada ketidaktepatan dalam melaksanakan program- program pembangunan kegiatan fisik di Desa Kandis.

Untuk mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka kesesuaian dalam tahap pengelolaan dana desa harus berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa yang baik wajib terlaksana. Perencanaan pengelolaan keuangan desa ialah penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ialah penerimaan dan pengeluaran desa menggunakan rekening kas desa, penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh kaur keuangan, pelaporan ialah Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa dan realisasi semester pertama kepada Bupati, dan pertanggungjawaban mengenai realisasi APB Desa kepada Camat setiap akhir tahun anggaran.

Dilihat dari prinsip pengelolaan keuangan desa dari fenomena yang ada menunjukkan bahwa Desa Kandis belum mampu melaksanakan pengelolaan

keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang mana pada indikator pelaporan dan pertanggungjawaban belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ini terlihat dari keterlambatan dalam pelaporan dan tidak dicantumkanya pada papan pengumuman mengenai kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana serta tempat pengaduan.

Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa melibatkan kemauan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggung jawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan Alokasi Dana Desa sebagai salah satu komponen didalamnya (Hanifa, 2015)

Alokasi Dana Desa merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Sejak otonomi daerah Alokasi Dana Desa dialokasikan melalui APBDes. Jadi, semakin tinggi tanggung jawab pengelolaan Alokasi Dana Desa aka semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan Alokasi Dana Desa rendah maka akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa rendah maka akuntabilitas penglolaan alokasi dana desa akan tidak baik (Subroto, 2019)

Transparansi adalah suatu keterbukaan untun menyediakan informasi yang material dan relevan atau sebenarnya dengan cara yang mudah diakses dan dipahami bagi orang yang bekepentingan. Sedangkan menurut United Nation

Development Program dalam menyatakan bahwa keterbukaan didirikan dalam kebebasan mendapat informasi. Suatu informasi yang diperoleh sesuai dalam kepentingan masyarakat secara langsung dapat diperoleh kepada semua yang membutuhkan. Akuntabilitas (Accountability) ialah kewajiban kepada tanggung jawab seseorang pemegang amanah untuk mengelola, menyajikan, melaporkan serta menyampaikan segala aktifitas yang dilaksanakan kepada pemberi amanah. bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen utama dari Good Corperate Governance (Tambuwun, dkk. 2019)

Tranparansi dan akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip Good Governance sangat penting di setiap organisasi yang meliputi transparansi dan keadilan, hal ini bertujuan agar organisasi tersebut dapat dipercaya oleh setiap stakeholder. Oleh karena itu setiap organisasi di pemerintah diharuskan melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut. Sejalan dengan berlangsungnya perkembangan otonomi daerah/desa yang memfokuskan diri pada mengupayakan pemberdayaan masyarakat desa, jadi peranan pemerintah daerah/desa tentu sangat penting menjadi suatu lembaga yang terkemuka dalam proses pemerintahan negara Indonesia dan mewujudkan secara spontan kepada warga desa. Agar sukses ataupun tidak sukses pencapaian lewat tujuan dilaksanakannya hak daerah/desa dalam suatu negara pemerintah tergantung kepada setiap beberapa baiknnya kualitas pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi dan wewenang sebagai pelayan

masyarakat desa terkemuka.

Urgensitas tentang pengelolaan dana desa mendapatkan kedudukan strategis untuk dikritisi dan diperdebatkan. Hal ini disebabkan pembangunan desa sebagai indikator pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Suatu negara tidak mengalami kemajuan tanpa adanya pertumbuhan positif dari provinsi, begitupun kemajuan provinsi ditentukan oleh tingkat kabupaten, tingkat kelurahan, hingga desa. Dengan kata lain, memastikan akuntabilitas dan transparansi pendanaan desa baik jangka pendek maupun jangka panjang berdampak pada kemajuan desa (Sugiharti and Hariani 2021).

Pada penelitian ini peneliti mendiskripsikan akuntabilitas dan transparansi sebagai pertanggungjawaban pengelolaan dana desa serta dengan cara mengkomparatifkan kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung serta SAPDesa sebagai standar akuntansi keuangan desa. Indikator pengelolaan keuangan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mencakup : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Indikator transparansi mencakup: perencanaan pembangunan desa, Laporan realisasi kepada masyarakat, Informasi yang diberikan kepada masyarakat (Siregar, 2024).

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitan dengan judul **“Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Kandis, Kabupaten Siak)”.**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Kandis, Kabupaten Siak?
2. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kandis?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Kandis, Kabupaten Siak.
2. Untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kandis.

1.3.2 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

   Penulis dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan khususnya Pengetahuan Akuntansi yang didapat selama perkuliahan melalui

penelitian ini sekaligus memperkaya wawasan penulis serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Akuntansi, khususnya perkembangan penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada kepala desa pentingnya penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mengatahui secara garis besar penyusunan skripsi, maka penulis akan menyusun dalam beberapa bab. Adapun sistematika yang akan diuraikan pada masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini peneliti menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Di dalam bab ini merupakan landasan teori yang terdiri dari perencanaan akuntabilitas, transparansi pengelolaan dana desa, pengertian desa, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan tentang objek penelitian, informan, jenis

dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan gambaran umum dari objek penelitian yang didalamnya terdiri dari sejarah berdiri, sturktur organisasi serta visi dan misi.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan serta menjelaskan hasil penelitian secara logis dan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian serta saran yang diberikan berdasarkan kesimpulan

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Kandis belum berjalan secara optimal. Meskipun secara formal pemerintah desa telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan sistematis melalui penggunaan aplikasi Siskeudes, pembagian tugas yang jelas, serta pelaporan rutin ke pihak kecamatan dan kabupaten, kenyataan di lapangan menunjukkan masih lemahnya implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip akuntabilitas yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan praktik administratif yang dilakukan pemerintah desa. Akuntabilitas yang seharusnya diwujudkan melalui pertanggungjawaban tepat waktu, penyediaan informasi yang lengkap, transparan, serta fasilitasi partisipasi publik dalam pengawasan belum sepenuhnya terimplementasi.
2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Kandis secara normatif telah diupayakan melalui berbagai mekanisme, seperti

musyawarah desa, rapat dusun, dan papan informasi. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa implementasinya masih belum optimal, terlihat dari keterlambatan pelaporan, tidak lengkapnya informasi pada papan publikasi, ketiadaan saluran pengaduan masyarakat, serta terbatasnya akses publik terhadap sistem Siskeudes. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen formal pemerintah desa dengan kenyataan administrasi di lapangan, sehingga prinsip transparansi belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Kandis perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi digital, seperti website atau media sosial resmi desa, untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.
2. Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan melalui pelatihan rutin sangat diperlukan untuk menjaga kualitas tata kelola dana desa..
3. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Dana Desa harus terus ditingkatkan agar pengelolaan dana berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai tujuan pembangunan desa.

6.3 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa memberikan bukti nyata bahwa teori agensi dapat berfungsi secara positif apabila relasi antara prinsipal (masyarakat dan pemerintah pusat/daerah) dan agen (pemerintah desa) dijalankan dengan tata kelola yang baik.
2. Secara praktis, keberhasilan penerapan akuntabilitas dan transparansi di Desa Kandis memberikan sejumlah pelajaran penting bagi desa-desa lain maupun lembaga pemerintahan lokal. Pertama, transparansi informasi anggaran dan kegiatan desa harus menjadi praktik rutin, tidak hanya sekadar formalitas administratif. Kedua, akuntabilitas bukan hanya soal pelaporan kepada atasan atau pemerintah desa, tetapi juga pelaporan yang jujur dan terbuka kepada masyarakat desa sebagai pemilik sah dari dana publik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Anastasya, H., & Noviyanti, S. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Tawalian Timur Kabupaten Mamasa. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 23(2)

Anggini, F. O. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Arromzi, T. M. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerinta Desa Dalam Peengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep. Universitas Islam Negerii Kiai Haji Achmad Siddiq Desa Kandis.

Azizah, W., & Andayani. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, *5*(1), 133–139. https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i1.33246

Dewi, Lita Tria. 2018. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Seluruh OPD di Kabupaten Jepara. Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang

Edowai, Mikael, Hermainawaty, Abubakar dan Miah Said (2021). *Akuntabilitas &Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Gowa: Pusaka Almaida.

Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2016). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, *01*(02), 1–23.

Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting Unipa*, *1*(1), 20–34.

Hermanto, B. A., Antoni, & Rospida, L. (2024). Transparency in Village Fund Management (A Case Study in the Bang Haji Subdistrict, Central Bengkulu Regency). *International Journal of Business and Applied Economics*, *3*(1), 35–54. https://doi.org/10.55927/ijbae.v3i1.7820

HIdayatullah, Fani. 2023. Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Ibrahim, A. (2021). Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam (A. Rahmati, Ed.; 1st Ed.). Pt. Naskah Aceh Nusantara.

Ikhsan. *(2018).* Akuntansi Sektor Publik: Untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi. Revisi. Madenatera.

Iznillah, M. L., Hasan, A., & Yesi Mutia. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, *7*(1), 29–41.

Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. S. (2022). Analisis Akuntanbilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *2*(1), 171–183. https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.21

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

Purba, H., Kurniawati, E., & Jamain, T. H. (2020). Analysis of Factors Affecting The Accountability of Village Fund Allocation Management (Case Study at the Village Office in Pangandaran District Pangandaran Regency). *International Journal of Economics and Management Studies*, *7*(3), 179–188. https://doi.org/10.14445/23939125/ijems-v7i3p123

Purnomo, Joko, 2016, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Infest, Yogyakarta Sadjiarjo, Arja (2020) Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 2, no. 2 (2020): 138-50

Sari Dewi Permata, Ananda. 2022. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar). Economics, Accounting and Business Journal. Vol. 2 No. 1

Sari, Eka Nurmala (2022). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 12, no. 2 (2022): 25-29

Sinaga, Devinta Indah Sari, Nurlaila, And Rahmat Daim Harahap. 2022. "Analisis Penerapan Sak Etap Pada Bumdesa Yang Ada Di Kecamatan Pulo Bandring Kebupaten Asahan." Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan 1, No. 3.

Siregar, A.W., Harahap, N., & Syakir, A. (2024). Analisis Penerapan Akuntanbilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Tanjung Morawa. Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan

Perpajakan. Vol 1(4).

Sofia, G., Afni, Z., & Andriani, W. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Nagari Aia Manggih periode 2018-2022). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *7*(2), 1172. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1390

Soleha, L., & Efendi, D. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–17.

Sugiharti, Chyntia Ambar, And Swarmilah Hariani. 2021. "Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa." Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis 6, No. 1.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.Bandung:Alfabeta.* Alfabeta.

Sutisna, S. A., & Widyawati, D. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *11*, 1–10.

Triana, E., Rahman, A., & Fatih, H. M. (2020). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) Di Desa Murutuwu Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis (S4)*, *5*(November), 1–12. http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jieb

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024

Usnan (2019) "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pada Pengelolaan BMT di Kota Surakarta (Studi pada BMT Al-Madinah)," Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi 5, no. 1 (Februari, 2019): 86.

Umar, H. (2018). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Rajawali Press. Widyanti, R. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan Kecamatab Ulakan Tapakis. *Lppm Umsb*, *XII*(11), 118–126.

Widagdo, D. O. K., and A. Chariri. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. Diponegoro Journal Of Accounting 3(3): 1-9